

**PENGARUH CAPITAL EXPENDITURE, SPECIAL ALLOCATION FUND,
GENERAL ALLOCATION FUND DAN LEVEL OF REGIONAL FINANCIAL
INDEPENDENCE**

Rianto¹, Heryanto²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta
rianto.feb@uia.ac.id¹; bangher999@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Capital Expenditures, Special Allocation Funds, General Allocation Funds on the Level of Regional Financial Independence in D.I Yogyakarta Province in 2014-2021. The samples used in this study were all regencies/cities in the Province of D.I Yogyakarta using the census sampling technique. The independent variables of this study are Capital Expenditures, Special Allocation Funds and General Allocation Funds. The dependent variable of this study is the Level of Regional Financial Independence. The results show that capital expenditure has no effect on the level of regional financial independence, while the Special Allocation Fund has a significant negative effect on the level of regional financial independence, and the general allocation fund has a significant negative effect on the level of regional financial independence.

Keywords: *Level of Regional Financial Independence, Capital Expenditure, Special Allocation Fund, General Allocation Fund*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi D.I Yogyakarta di tahun 2014-2021. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta dengan menggunakan teknik sampling census sampling. Variabel independen penelitian ini adalah Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Variabel dependen penelitian ini adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Kata Kunci: *Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum*

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah, yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah terjadi perubahan yang fundamental terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan mendasar tersebut adalah pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya (Nasution, 2019: 1-3).

Menurut Analisis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Eduardo Edwin Ramda yang dilansir artikel www.bisnis.com, bahwa dalam pemenuhan belanja masing-masing daerah, sebagian besar pemerintah daerah masih mempunyai dependensi yang besar terhadap transfer dari pemerintah pusat. Laporan yang sama juga menyatakan bahwa sejumlah 468 pemerintah daerah atau sebanyak 93,04 persen dari total pemerintah daerah tidak mengalami perubahan kategori kemandirian fiskal dari tahun 2013 sampai pandemi di tahun 2019.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah diantaranya adalah Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum. Belanja Modal salah satunya, dimana dalam *literatur public finance*, khususnya dalam konteks kemandirian keuangan daerah dikenal dengan istilah *expenditure assignment*, yang artinya adalah kewenangan pengeluaran yang didesentralisasikan kepada daerah. Besarnya kewenangan pengeluaran tersebut idealnya sama dengan besarnya biaya atau belanja yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi atau urusan yang menjadi tanggung jawab daerah (Djaenuri, 2014:14). Dengan demikian salah faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah Belanja Modal.

Kemudian faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Dimana, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum tersebut merupakan bagian dari dana perimbangan. Dana perimbangan ini bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah agar dapat membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah (Usman & Nurazi 2021:59).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah memiliki gap research yang berbeda-beda. Hasil penelitian Riyadi (2020) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Tama dkk, (2021) menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional menunjukkan hasil penelitian yang berbeda. Dimana, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kustianingsih, dkk (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2020) dan Musfirati & Sugiyanto (2021), dimana Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Terakhir, adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dimana dana yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah ini memiliki hasil penelitian yang berbeda. Dimana hasil penelitian Musfirati dan Sugiyanto (2021) dengan judul penelitian Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut Kustianingsih, dkk (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap kemandirian keuangan daerah ternyata memberikan hasil yang tidak sama di setiap penelitiannya. Sehingga, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap wilayah di pemerintah daerah tingkat II di Provinsi D.I Yogyakarta sebagai objek penelitian. Berdasarkan fenomena dan masalah di atas, penulis ingin melakukan suatu penelitian studi kasus pada salah satu provinsi yang memiliki indeks kemandirian fiskalnya rendah, yaitu Provinsi D.I Yogyakarta. Sehingga, judul dalam penelitian ini adalah *“Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus pada Provinsi D.I. Yogyakarta Periode 2014-2021”*.

Perumusan Masalah Untuk merumuskan penelitian ini, maka acuan penulis adalah dengan fenomena dan latar belakang di atas dengan rumusan: apakah ada pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?, apakah ada pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?, apakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?.

TINJAUAN TIORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Stakeholder

Salah satu dasar dari pada teori pemangku kepentingan (stakeholder) dalam konsep awal good governance yang dirumuskan oleh United Nations Development Program (UNDP, 1996) adalah partisipasi. Dimana semua pemangku kepentingan (stakeholder) memiliki hak untuk bersuara dalam penyusunan kebijakan publik. Hal ini merupakan pondasi legitimasi semua sistem demokratis (Santoso: 2019:147). Menurut Mardiasmo (2018:10) untuk melihat bagaimana kualitas suatu pemerintah, maka dilihat dari sisi partisipasi masyarakatnya.

Teori Desentralisasi (Otonomi Daerah)

Desentralisasi adalah perlimpahan wewenang, tanggungjawab, dan sumber daya melalui dekosentrasi, delegasi dari pemerintah pusat ke pemerintah kepada daerah otonom (Santoso, 2019:145-146). Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah telah melakukan desentralisasi fiskal melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta antar pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018:8).

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehingga secara definisi kemandirian keuangan daerah, yaitu daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan daerahnya. Kondisi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola keuangan tanpa intervensi pemerintah pusat (Halim & Iqbal, 2019: 2-11).

Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun yang akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan (Halim & Iqbal, 2019: 27).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Djaenuri (2014:100), bahwa DAK dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luar daerah daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dialokasikan berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang (Renyowijoyo, 2013:1125).

Berdasarkan pada pertimbangan penulis dan hasil penelitian-penelitian terdahulu penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

H1: Belanja Modal Berpengaruh Positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan.Daerah

H2: Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

H3: Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

METODE

Metode Penelitian Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Dalam statistik deskriptif,dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel yang telah ditentukan dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi yang digunakan pada masing-masing variabel yaitu Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Provinsi D.I. Yogyakarta Periode 2014-2021). Setelah melakukan analisa deskripsi, dilakukan pengujian asumsi klasik dan analiisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS 26.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	St.dev	Min	Max
KKD	23.14%	9.02%	10%	27%
BM	16.95%	8,12%	10%	27%
DAK	0,60%	0,48%	1%	1,98%
DAU	99,8%	0,42%	0,98%	5,31%

Sumber: Diolah dari SPSS 2.6

Berdasarkan hasil tabel analisis deskriptif pada Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa nilai maksimum Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 27% dan nilai minimum pada Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 10%. Sedangkan rata-rata dari Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 23.14% dengan tingkat standar deviasi sebesar 9.02%. Sedangkan, hasil analisis deskriptif pada Belanja Modal menunjukkan bahwa nilai minimum Belanja Modal sebesar 10%, dan nilai maksimum sebesar 27%. Sedangkan nilai rata-rata dari Belanja Modal sebesar 16.95% dengan tingkat standar deviasi sebesar 8,12%.

Kemudian, analisis deskriptif pada Dana Alokasi Khusus menunjukkan bahwa nilai minimum Dana Alokasi Khusus sebesar 0,005 (1%) dan nilai maksimum sebesar 1,98%. Sedangkan nilai rata-rata dari Dana Alokasi Khusus sebesar 0,60% dengan tingkat standar deviasi sebesar 0,48%. Terakhir, analisis deskriptif pada DAU menunjukkan bahwa nilai minimum DAU sebesar 0,98% dan nilai maksimum sebesar 5,31%. Sedangkan nilai rata-rata dari DAU sebesar 99,8% dengan tingkat standar deviasi sebesar 0,42%.

Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 2 Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		<u>Unstandardized Coefficients</u>		<u>Standardized Coefficients</u>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,406	0,025		16,004	0
	Belanja Modal	-0,045	0,141	-0,019	-0,321	0,75
	DAK	-0,043	0,014	-0,224	-3,097	0,004
	DAU	-0,059	0,005	-0,79	-11,323	0

a. Dependent Variable: TKKD

Dari output di atas diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$Y = (0,406) + (-0,045) X1 + (-0,043) X2 + (-0,059) X3$ Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- a = 0,046 Artinya jika variabel Belanja Modal (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) dan Dana Alokasi Umum (X3) bernilai (0), maka nilai variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y) diperoleh 0,406.
- b1 = -0,045 Artinya setiap penambahan satu satuan variabel Belanja Modal (X1) dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan nilai variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar -0,045. Sebaliknya setiap kenaikan satu satuan variabel Belanja Modal (X1) dan variabel lainnya konstan, maka akan meningkatkan variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar -0,045.
- b2 = -0,043 Artinya setiap penambahan satu satuan variabel Dana Alokasi Umum (X2) dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan nilai variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar -0,043. Sebaliknya setiap kenaikan satu satuan variabel Dana Alokasi Khusus (X2) dan variabel lainnya konstan, maka akan meningkatkan variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar -0,043.
- b3 = -0,059 Artinya setiap penambahan satu satuan variabel Dana Alokasi Umum (X3) dan variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan nilai variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar -0,059. Sebaliknya setiap kenaikan satu satuan variabel Dana Alokasi Umum (X3) dan variabel lainnya konstan, maka akan meningkatkan variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y) sebesar -0,059.

Uji f-statistik

Tabel 3 Hasil Uji f Statistik

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,294	3	0,098	92,611	,000 ^b
	Residual	0,038	36	0,001		
	Total	0,332	39			
a. Dependent Variable: TKKD						
b. Predictors: (Constant), DAU, Belanja Modal, DAK						

Berdasarkan tabel diatas bahwa f_{hitung} sebesar 92,611 sedangkan f_{tabel} 2.87 sehingga $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $92,611 > 2.87$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak, artinya secara simultan variabel Belanja Modal (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) dan Dana

Alokasi Umum (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

Uji t-statistik

Tabel 4 Hasil Uji t Statistik

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,406	0,025		16,004	0
	Belanja Modal	-0,045	0,141	-0,019	-0,321	0,75
	DAK	-0,043	0,014	-0,224	-3,097	0,004
	DAU	-0,059	0,005	-0,79	-11,323	0

a. Dependent Variable: TKKD

Berdasarkan data analisis diatas menunjukkan nilai t variabel Belanja Modal diperoleh t_{hitung} sebesar -0,321 dan nilai ini akan dibandingkan dengan nilai $t_{tabel} \pm 2,030$ dengan demikian $t_{hitung} (-0,321) < t_{tabel} (2,030)$ atau $sig (0,750) > \alpha (0,05)$. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5 Hasil Uji t Statistik

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,941 ^a	0,885	0,876	0,03255

a. Predictors: (Constant), DAU, Belanja Modal, DAK

b. Dependent Variable: TKKD

Dari tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,885 yang berarti bahwa perubahan Kemandirian Keuangan Daerah dapat dipengaruhi oleh perubahan variabel Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Khusus sebesar 88.5%. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi $> 80\%$ mempunyai hubungan yang sangat tinggi. Sedangkan sisanya 11.5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh hasil yang mengungkapkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia, dkk (2019) & Handayani, dkk (2020) menyatakan bahwa Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini terjadi disebabkan oleh Belanja Modal yang dilakukan belum merata dan tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan penurunan kualitas layanan publik maka kemandirian keuangan daerah menurun. Karena semakin besar belanja modal maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh hasil yang mengungkapkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Musfitati & Sugiyanto, 2021).

Pengaruh Dana Alokasi Umum Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh hasil yang mengungkapkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Kustianingsih dkk, 2018) & (Musfitati & Sugiyanto, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bukit (2022) dimana Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi D.I Yogyakarta Periode 2014-2021, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji simultan uji F, bahwa secara simultan variabel Belanja Modal (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) dan Dana Alokasi Umum (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Hal ini terlihat dari pengujian $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar 92,6% sedangkan F_{tabel} 2.87% sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $92,6\% > 2.87\%$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ yang mana H_0 ditolak.

2. Berdasarkan hasil uji parsial uji t, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial. Karena nilai thitung untuk Belanja Modal sebesar -0,32 dan t_{tabel} sebesar 2,03% dan nilai signifikansi sebesar 0,750 yang menunjukkan bahwa tingkat signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal dimana Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi D.I Yogyakarta. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum berpengaruh Negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal dimana Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum berpengaruh Negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi D.I Yogyakarta.

Saran

Ada beberapa hal yang penulis sadari pada penelitian ini, yaitu penulis memiliki keterbatasan pada variabel yang diteliti pada penelitian ini. Dimana variabel yang diteliti hanya sebatas Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum yang pada umumnya sudah banyak digunakan oleh peneliti sebelumnya. Penulis memiliki saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan peneliti selanjutnya jika ingin melakukan penelitian terkait Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah agar mencari variabel lain yang lebih tepat dan dipastikan memiliki pengaruh dan keterkaitan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini tentu akan menjadi sumbangsih ide yang sangat luar biasa bagi peningkatan kemandirian keuangan daerah di Indonesia khususnya di Provinsi D.I Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basuki, T & Prawoto, N. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Edisi 1, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta;
- Djaenuri, A. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Edisi 2, Ghalia Indonesia. Bogor;
- Halim, A dan Iqbal, M. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 4, UPP STIM YKPN. Yogyakarta;
- Halim, A dan Kusufi, M. (2018). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. : Salemba Empat. Jakarta;
- Halim, A. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta;
- Juhro, dkk. 2019. *Keuangan Publik dan Sosial Islam: Teori dan Praktik*. Edisi 1, PT RajaGrafindo Persada. Depok;
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi, UII Press. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 4, SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN. Yogyakarta;
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Terbaru, ANDI. Yogyakarta;

- Martono, N. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Edisi Revisi 2. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta;
- Ratmono, D & Sholihin, M. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Kedua Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN. Yogyakarta;
- Renyowijoyo, M. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Edisi 3, Mitra Wacana Media. Jakarta;
- Santoso, D. 2019. *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Edisi 1, Yayasan Pustakan Obor Indonesia. Jakarta;
- Sujarweni, W. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Edisi1. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Usman, B dan Nurazi, R. 2021. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Edisi 1, Mandar Maju. Bandung.

Jurnal

- Andriana, Nina. 2020. Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 1(2): 105–13.
- Indra Tama, Annafi, and Isti Pujihastuti. 2022. Determinan Kemandirian Keuangan (Studi pada Pemda Tingkat II Di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Equity* 24(2): 263.
- Kustianingsih, dkk 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal Katalogis* 6(6): 82–91.
- Musfirati, A dan Sugiyanto, H. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah (Studi Kasus pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Substansi*. 5(1): 20-36;
- Nama, F.R. dan Khoirudin, R. 2021. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosiding SENAMA. 115-124;
- Riyadi. 2018. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi (JAKSI)* 6(11), 951–952. 3: 10–27.

Sumber Rujukan dari Website

- BPS. 2022. *Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota*. [https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/928..Diakses tanggal 08 September 2022;](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/928..Diakses_tanggal_08_September_2022;)
- BPS. 2022. *Data Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka Periode 2014-2021*. <https://kulonprogokab.bps.go.id/publikasi.html>
- BPS. 2022. *Data Kabupaten Bantul Dalam Angka Periode 2014-2021*. <https://bantulkab.bps.go.id/publication.html>
- BPS. 2022. *Data Kabupaten Gunung Kidul Dalam Angka Periode 2014-2021*. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/publikasi.html>
- BPS. 2022. *Data Kabupaten Sleman Dalam Angka Periode 2014-2021*. <https://slemankab.bps.go.id/publikasi.html>

- BPS. 2022. *Data Kota Jogja Dalam Angka Periode 2014-2021*. <https://jogjakota.bps.go.id/publication.html?page=2>
- Friana, H (2018). Dana Transfer Umum ke Daerah Tak Efektif, Pembangunan Mandek?. <https://tirto.id/dana-transfer-umum-ke-daerah-tak-efektif-pembangunan-mandek-dbFG>. Diakses tanggal 08 September 2022;
- Helmizar. 2021. *Pemda Harus Berinovasi untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal Daerah*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34485/t/javascript;>. Diakses tanggal 04 September 2022;
- Ramda. 2021. *Fiskal Daerah Tak Kunjung Mandiri, KPPOD Harap UU HKPD Jadi Solusi* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211223/10/1481038/fiskal-daerah-tak-kunjung-mandiri-kppod-harap-uu-hkpd-jadi-solusi>. Diakses tanggal 04 September 2022.

Regulasi

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.07/2021 *tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;*
- Peraturan Menteri Nomor 17/PMK.07 Tahun 2021 *tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;*
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 *tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah;*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.*